

Evaluasi Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Zona di Kota Pangkalpinang

Revy Safitri^{1,*}, Ririn Amelia², Jeanne Darc Noviayanti Manik³

¹ Teknik Sipil; Universitas Bangka Belitung; Jl. Kampus Terpadu Balunijuk;
e-mail: revy.safitri@gmail.com

² Matematika; Universitas Bangka Belitung; Jl. Kampus Terpadu Balunijuk;
e-mail: rynamelia.babel@gmail.com

³ Ilmu Hukum; Universitas Bangka Belitung; Jl. Kampus Terpadu Balunijuk;
e-mail: novi_palembang@yahoo.com

* Korespondensi: e-mail: revy.safitri@gmail.com

ABSTRAK

Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Bangka Belitung menjadi pusat kegiatan yang menimbulkan pergerakan kendaraan yang tinggi, dimana tingginya pergerakan kendaraan akan mempengaruhi besarnya kebutuhan ruang parkir. Penyediaan ruang parkir di Kota Pangkalpinang tidak hanya menggunakan lahan parkir, namun juga menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan atau yang disebut parkir di tepi jalan umum. Implementasi kebijakan tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang dinilai belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang berdasarkan zona yang telah ditetapkan untuk mengetahui kesesuaian tarif parkir di tepi jalan umum yang berlaku saat ini. Evaluasi tarif parkir di tepi jalan umum dianalisis berdasarkan *Ability To Pay* (ATP) dan *Willingness To Pay* (WTP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tarif resmi parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan, baik untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 masih terlalu rendah dan masih bisa ditingkatkan. Penyesuaian tarif resmi dapat dilakukan mengikuti rata – rata tarif yang berlaku atau lebih, namun idealnya tidak melebihi nilai ATP. Dalam penyesuaian tarif, hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengevaluasi kebijakan tarif parkir di tepi jalan umum yang berlaku saat ini.

Kata kunci: Parkir di tepi jalan umum, Tarif parkir, *Ability To Pay*, *Willingness To Pay*

ABSTRACT

Pangkalpinang City, the Capital of Bangka Belitung province, is the center of various activity with the characteristic of high vehicle trips; therefore, the larger parking spaces are needed. The parking spaces in this city utilizes not only the parking lots but also on-street parking. The implementation of on-street parking fee policy recently has not run optimally. This study aims to evaluate the on-street parking fee in Pangkalpinang City based on the parking zone to determine appropriate parking fee. In this study, the evaluation of on-street parking fee was analyzed based on Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP). Result showed that the existing parking fee for motorcycle and car is too low and needs to be revised. The existing parking fee can be adjusted to more than the average real parking fee but ideally the fee should not more than the ATP value. This result can be used as a guidance for Pangkalpinang City Government to evaluate the on-street parking fee policy.

Keyword: *On-street parking, Parking fee, Ability To Pay, Willingness To Pay*

1. PENDAHULUAN

Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Bangka Belitung menjadi pusat kegiatan dalam berbagai bidang yang menimbulkan pergerakan kendaraan yang tinggi di wilayah ini. Disisi lain, diketahui bahwa kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama yang disebut parkir [Warpani, 2002]. Parkir didefinisikan sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya [Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22, 2009]. Kendaraan yang parkir membutuhkan ruang untuk parkir. Kebutuhan ruang parkir akan semakin meningkat seiring bertambahnya kendaraan yang menuju ke suatu tempat [Rye, 2010].

Tingginya pergerakan kendaraan di Kota Pangkalpinang mempengaruhi besarnya kebutuhan ruang parkir di wilayah ini. Penyediaan ruang parkir di Kota Pangkalpinang tidak hanya menggunakan lahan parkir, namun juga menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan atau yang disebut parkir di tepi jalan umum. Dalam rangka penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan kebijakan terkait penetapan lokasi dan tarif parkir. Penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang dikelompokkan dalam beberapa zona [Keputusan Walikota Pangkalpinang No: 349/KEP/DISHUB/IX/2017, 2017]:

- Zona A : Jalan Masjid Jami' dan sekitarnya
- Zona B : Area Ramayana, BTC, dan sekitarnya
- Zona C : Jalan Jendral Sudirman dan sekitarnya
- Zona D : Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya

Sedangkan, tarif retribusi parkir tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut [Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5, 2016]:

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kendaraan roda 2 (dua) | Rp 1.000,00/ kendaraan/ parkir |
| Kendaraan roda 4 (empat) | Rp 2.000,00/ kendaraan/ parkir |
| Di atas roda 4 (empat) | Rp 3.000,00/ kendaraan/ parkir |

Implementasi kebijakan tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan antara tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tarif yang berlaku, dimana tarif yang berlaku lebih mahal bila dibandingkan dengan tarif yang telah ditetapkan. Dalam penelitian sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi tarif parkir di tepi jalan umum pada Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center, diketahui bahwa tarif resmi yang ditetapkan masih bisa ditingkatkan dengan diikuti peningkatan fasilitas parkir [Safitri and Amelia, 2018]. Ini artinya, tarif yang berlaku masih relatif rendah. Tarif parkir di tepi jalan umum yang relatif murah akan lebih menarik masyarakat untuk parkir kendaraan menggunakan badan jalan. Penggunaan badan jalan yang berlebihan sebagai ruang parkir akan mengurangi lebar efektif jalan yang berdampak pada turunnya kapasitas ruas jalan, sehingga mengakibatkan gangguan arus lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan.

Penelitian ini mencoba mengevaluasi tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang berdasarkan zona yang telah ditetapkan untuk mengetahui kesesuaian tarif parkir di tepi jalan umum yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengevaluasi kebijakan tarif parkir di tepi jalan umum yang berlaku saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, evaluasi tarif parkir di tepi jalan umum dianalisis berdasarkan *Ability To Pay* (ATP) dan *Willingness To Pay* (WTP). *Ability To Pay* (ATP) adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Sedangkan, *Willingness To Pay* (WTP) adalah kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya [Tamin et al., 1999]. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden pengguna kendaraan roda 2 dan 100 responden pengguna kendaraan roda 4 yang melakukan parkir di tepi

jalan umum. Kuesioner disebar secara merata dalam 4 zona sesuai dengan zona yang ditetapkan pemerintah.

Analisis ATP dan WTP

Analisis *Ability To Pay* (ATP) merupakan besaran kemampuan seseorang untuk membayar retribusi parkir dianalisis berdasarkan penghasilan, biaya transportasi, biaya parkir, dan frekuensi penggunaan fasilitas parkir. Sedangkan, analisis *Willingness To Pay* (WTP) merupakan besaran kemauan seseorang untuk membayar retribusi parkir diperoleh dari rata – rata tarif retribusi parkir yang bersedia dibayarkan berdasarkan persepsi pengguna fasilitas parkir terhadap fasilitas parkir yang tersedia.

Dalam pelaksanaan penentuan tarif, ada 3 kondisi hubungan antara ATP dan WTP, yaitu [Tamin et al., 1999]:

- ATP lebih besar dari WTP

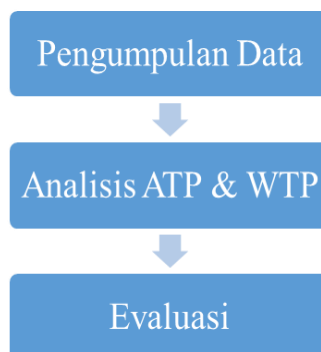
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar jasa transportasi lebih besar daripada kemauan membayar. Pada kondisi ini, pengguna mempunyai penghasilan yang relatif lebih tinggi tetapi utilitas terhadap jasa tersebut relatif lebih rendah.

- ATP sama dengan WTP

Antara kemampuan dan kemauan membayar jasa ialah sama. Keseimbangan utilitas pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tersebut.

- ATP lebih kecil dari WTP

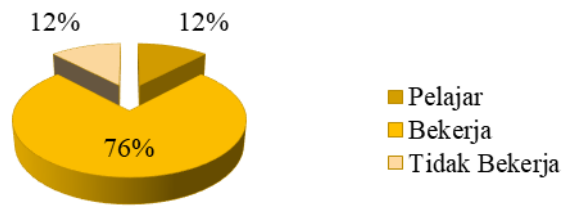
Kemampuan membayar jasa transportasi lebih kecil daripada kemauan membayar. Pada kondisi ini, pengguna mempunyai penghasilan yang relatif lebih rendah tapi utilitas terhadap jasa tersebut relatif tinggi.



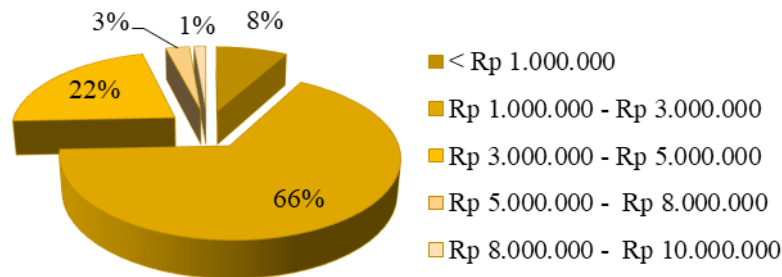
Gambar 1. Tahapan Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik pengguna parkir ditinjau dari jenis pekerjaan dan pendapatan per bulan dinilai ikut mempengaruhi nilai ATP dan WTP. Berdasarkan hasil survei, karakteristik pengguna kendaraan yang parkir di tepi jalan umum ditinjau dari jenis pekerjaan dan pendapatan per bulan untuk pengguna kendaraan roda 2 ditampilkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Selanjutnya, karakteristik pengguna kendaraan yang parkir di tepi jalan umum ditinjau dari jenis pekerjaan dan pendapatan per bulan untuk pengguna kendaraan roda 4 ditampilkan pada Gambar 4 dan Gambar 5.

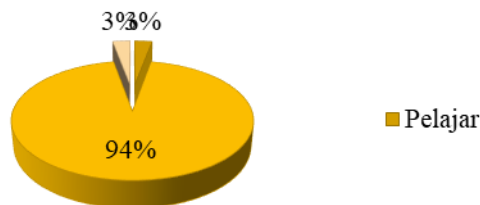


Gambar 2. Status Pekerjaan Pengguna Parkir Kendaraan Roda 2

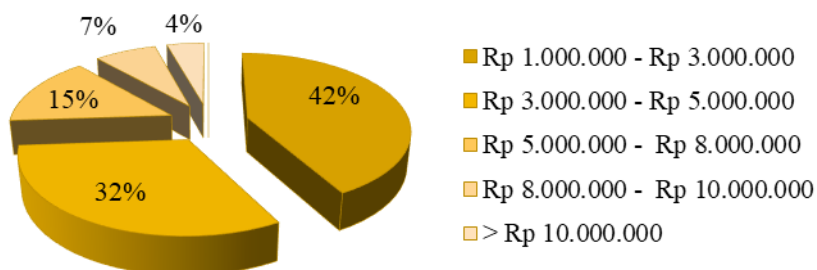


Gambar 3. Pendapatan Per Bulan Pengguna Parkir Kendaraan Roda 2

Hasil analisis menunjukkan 76% pengguna parkir kendaraan roda 2 di Kota Pangkalpinang berstatus bekerja. Bila ditinjau dari pendapatan per bulan, sebagian kecil pengguna parkir kendaraan roda 2 memiliki penghasilan di bawah Rp 1.000.000,00 yaitu sebesar 8%, selebihnya memiliki pendapatan di atas Rp 1.000.000,00. Diketahui pula bahwa rentang terbanyak berada pada Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 yaitu sebesar 66% dan diikuti rentang Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 sebanyak 22%.



Gambar 4. Status Pekerjaan Pengguna Parkir Kendaraan Roda 4

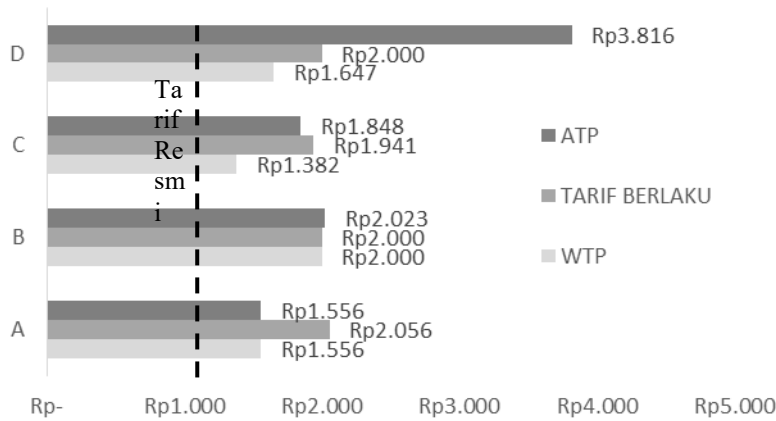


Gambar 5. Pendapatan Per Bulan Pengguna Parkir Kendaraan Roda 4

Berdasarkan hasil analisis, 94% pengguna parkir kendaraan roda 4 yang parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang berstatus bekerja. Ditinjau berdasarkan pendapatan per bulan, rentang penghasilan pengguna parkir kendaraan roda 4 di atas Rp 1.000.000,00, dimana paling banyak berada pada rentang Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 yaitu sebesar 42% dan diikuti rentang Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 sebanyak 32%.

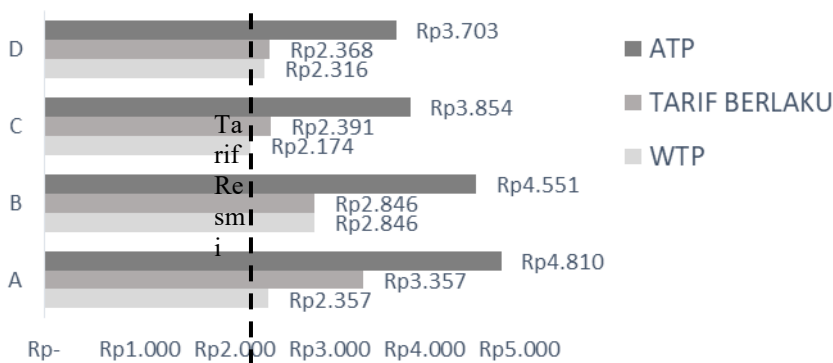
Hasil Analisis ATP dan WTP

Analisis ATP dan WTP dilakukan berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden di 4 zona parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang. Data yang diperoleh direduksi sehingga menghasilkan nilai ATP dan WTP. Perbandingan nilai ATP dan WTP untuk kendaraan roda 2 di masing – masing zona dengan tarif resmi dan rata – rata tarif yang berlaku ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Perbandingan Nilai ATP dan WTP untuk Kendaraan Roda 2 Masing – masing Zona dengan Tarif Resmi dan Rata – rata Tarif yang Berlaku

Grafik pada Gambar 6 menunjukkan tarif resmi berada di bawah nilai ATP, WTP, dan rata – rata tarif yang berlaku di seluruh zona. Selain itu, pada Zona A, ATP dan WTP memiliki nilai yang sama sedangkan rata – rata tarif yang berlaku berada di atas nilai ATP. Selanjutnya, nilai WTP dan tarif yang berlaku di Zona B memiliki nilai yang sama, sedangkan nilai ATP dinilai tidak jauh berbeda dengan nilai ATP dan rata - rata tarif yang berlaku. Pada Zona C nilai ATP dan WTP di bawah rata - rata tarif yang berlaku. Sedangkan, pada Zona D nilai ATP berada jauh di atas nilai WTP dan rata – rata tarif yang berlaku.



Gambar 7. Perbandingan Nilai ATP dan WTP untuk Kendaraan Roda 2 Masing – masing Zona dengan Tarif Resmi dan Rata – rata Tarif yang Berlaku

Perbandingan nilai ATP dan WTP untuk kendaraan roda 4 di masing – masing zona dengan tarif resmi dan rata – rata tarif yang berlaku ditampilkan pada Gambar 7. Grafik tersebut menunjukkan bahwa tarif resmi berada di bawah nilai ATP, WTP, dan rata – rata tarif yang berlaku di seluruh zona. Bila ditinjau pada setiap zona, Zona A, C, dan D memiliki nilai ATP yang lebih besar dibandingkan nilai WTP, tidak hanya itu rata – rata tarif yang berlaku pun masih berada di bawah nilai ATP. Sedangkan, pada Zona B, nilai WTP sama dengan rata – rata tarif yang berlaku dan keduanya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai ATP.

Evaluasi Tarif

Berdasarkan analisis ATP dan WTP, tarif parkir kendaraan roda 2 di tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang pada setiap zona memiliki kondisi yang berbeda, namun dapat dikatakan bahwa tarif resmi untuk kendaraan roda 2 dinilai masih terlalu rendah dan masih bisa ditingkatkan. Sedangkan, untuk kendaraan roda 4, secara umum dapat dikatakan bahwa nilai ATP lebih besar dari WTP, sedangkan rata – rata tarif yang berlaku berada di atas WTP namun tidak lebih besar dari nilai ATP. Selain itu, sama halnya dengan kendaraan roda 2, tarif resmi untuk kendaraan roda 4 dinilai masih terlalu rendah dan masih bisa ditingkatkan. Penyesuaian tarif resmi dapat dilakukan mengikuti rata – rata tarif yang berlaku atau lebih, namun idealnya tidak melebihi nilai ATP. Selanjutnya, hasil penyesuaian tarif dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengevaluasi kebijakan tarif parkir yang berlaku saat ini.

4. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi tarif parkir di tepi jalan umum berdasarkan ATP dan WTP di Kota Pangkalpinang untuk setiap zona, dapat disimpulkan bahwa tarif resmi yang ditetapkan baik untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 masih terlalu rendah dan masih bisa ditingkatkan. Penyesuaian tarif resmi dapat dilakukan mengikuti rata – rata tarif yang berlaku atau lebih, namun idealnya tidak melebihi nilai ATP. Dalam penyesuaian tarif, hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengevaluasi kebijakan tarif parkir yang berlaku saat ini.

Ucapan Terima Kasih

Paper ini merupakan bagian dari Penelitian Dosen Tingkat Universitas Tahun 2019 Universitas Bangka Belitung. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Universitas Bangka Belitung selaku penyandang dana.

REFERENSI

- Keputusan Walikota Pangkalpinang No: 349/KEP/DISHUB/IX/2017. 2017. Pangkalpinang, Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5. 2016. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Rye T. 2010. Parking Management: A Contribution Towards Liveable Cities. Transp. Policy Advis.: 1–50.
- Safitri R, Amelia R. 2018. Evaluasi Tarif On-Street Parking berdasarkan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) di Kawasan Plaza Pangkalpinang - Bangka Trade Center Kota Pangkalpinang. Batam: Konteks 12, p 195–200.
- Tamin OZ, Rahma H, Kusumawati A, Munandar AS, Setiadji BH. 1999. Ability To Pay (Atp) Dan Willingness To Pay (Wtp). 1: 121–139.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22. 2009. Indonesia.
- Warpani SP. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: Penerbit ITB.